Kegiatan Usaha Koperasi yang Pelayanannya Dilakukan kepada Anggota dan Bukan Anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis Filosofis dan Tujuan Koperasi Mensejahterakan Anggota

Meisa*, Yeti Sumiyati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*akunnyameisa@gmail.com, yeti74sumiyatibdg@gmail.com

Abstract. Cooperatives are business entities that uphold the principle of kinship as contained in Article 33 paragraph 1 of the Constitution. In a cooperative, satisfactory service is something that needs to be considered for the continuity of the cooperative's business. However, Article 43 paragraph (2) of the Cooperative Law states that Cooperative services can not only be provided to members, but also to non-members. Therefore, the purpose of this study is to determine the business activities of cooperatives whose services are provided to members and non-members in terms of juridical and philosophical aspects. The research method used is a normative juridical approach by researching from library materials or secondary data. and in this approach the researcher will examine the adequacy of the juridical and philosophical aspects of the service business by the cooperative through library research as a secondary data collection method. Cooperatives whose goal is to prosper members can in fact be carried out also to the community through the advantages of cooperative business service capabilities for members. Which is after the members are prospered and given the benefits of services/business by the cooperative, people who are not members can be provided with business services as business transactions by the cooperative from the excess funds and resources owned by the cooperative. All of this is done to attract people to become members of the cooperative. and this provision does not apply to savings and credits cooperatives and savings and credits units.

Keywords: *Cooperatives, People's Economy, Cooperative Business, Welfare of Members.*

Abstrak. Koperasi merupakan badan usaha yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan sebagaimana terdapat pada Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar. Didalam suatu Koperasi pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan usaha Koperasi. Namun pada Pasal 43 ayat (2) UU PerKoperasian menyebutkan bahwa pelayanan Koperasi tidak hanya dapat dilakukan pada anggota, tetapi masyarakat yang bukan anggota juga. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kegiatan Usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Anggota dan Bukan anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Filosofis. beserta implementasi kegiatan usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Bukan anggota dihubungkan dengan tujuan Koperasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan cara meneliti dari bahan pustaka atau data sekunder belaka. dan dalam metode pendekatan ini peneliti akan mengkaji kecukupan aspek yuridis beserta filosofisnya mengenai usaha pelayanan oleh Koperasi melalui penelusuran pustaka sebagai metode pengumpulan data sekunder. Koperasi yang tujuannya mensejahterakan anggota nyatanya dapat dilakukan juga kepada masyarakat melalui kelebihan kemampuan pelayanan usaha koperasi terhadap anggota. Yang mana setelah anggota disejahterakan dan diberi manfaat atas pelayanan/bisnis oleh koperasi, masyarakat yang bukan anggota dapat diberikan pelayan usaha sebagai transaksi bisnis oleh koperasi dari kelebihan dana dan daya yang dimiliki koperasi tersebut. Semua itu dilakukan agar menarik masyarakat menjadi anggota koperasi. dan ketentuan ini tidak berlaku untuk koperasi simpan pinjam. dan unit simpan pinjam.

Kata Kunci: *Koperasi, Ekonomi kerakyatan, Usaha Koperasi, Mensejahterakan Anggota.*

A. Pendahuluan

Pada konsep demokrasi ini rakyat Indonesia dianggap berdaulat atau memegang kekuasaan tertinggi, baik dibidang politik maupun dan juga bidang ekonomi. Demokrasi dalam bidang ekonomi adalah sebuah konsep yang digagas Hatta mengenai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, konsep ini diterjemahkan pada Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945.

Pasal 33 UUD 1945 mengatur perekonomian, dan mengatur juga jaminan kebebasan menyatakan pendapat, berserikat, dan keadilan sosial. Jadi ciri-ciri ekonomi kerakyatan mempunyai akar sejarah yang dalam dan kuat. Ekonomi kerakyatan ini mengandung tiga unsur, yaitu populis, berkeadilan sosial, dan demokratis. Dengan adanya demokrasi ekonomi, bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran individu sebagai mana yang dibolehkan dalam sistem ekonomi kapitalis.

Koperasi merupakan badan usaha yang menjunjung tinggi asas kekeluargaan didalamnya sebagaimana terdapat pada Pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar atau selanjutnya disebut UUD menyatakan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan." Makna yang terkandung dalam pasal tersebut adalah bahwa seharusnya sistem ekonomi dikembangkan tidak berbasis persaingan serta atas asas yang sangat individualistik.

Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota Koperasi yang bersangkutan dan Koperasi lain dan/atau anggotanya. Meninjau Pasal 17 UU PerKoperasi, Dalam organisasi Koperasi Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi dan keanggotaan Koperasi tersebut dicatat dalam buku daftar anggota. Yang dapat menjadi anggota Koperasi adalah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Anggota Koperasi sebagai pemilik, menentukan gerak dan arah organisasi Koperas, oleh karena itu keputusan anggota dalam forum Rapat Anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dari organisasi Koperasi ini. Pasal 19 UU PerKoperasian menyebutkan bahwa dalam pembentukan keanggotaan Koperasi dapat didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi serta keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat yang diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.

Usaha Koperasi memiliki beberapa jenis yang berbeda, sebagaimana yang tercantum pada UU PerKoperasian dari jenis usahanya yaitu terdapat Koperasi Produsen, Koperasi Konsumen, Koperasi simpan pinjam, Koperasi Pemasaran dan Koperasi Jasa. Lalu terdapat dari jenis tingkatannya yaitu Koperasi Primer dan Koperasi .

Didalam suatu Koperasi pelayanan yang memuaskan merupakan hal yang perlu diperhatikan bagi kelangsungan usaha Koperasi. Usaha Koperasi ini merupakan usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hans Munker bahwa: "Sesuai dengan tujuan Koperasi maka prioritas yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, pertumbuhan perusahaan Koperasi yang berkesinambungan bukanlah tujuan akhir melainkan merupakan pembenaran dalam kaitan dengan perbaikan kapasitas Koperasi dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggotanya". Tetapi pada Pasal 43 ayat (2) UU PerKoperasian pun menyebutkan bahwa pelayanan Koperasi dapat digunakan terhadap bukan anggota. Penjelasan tersebut dijelaskan di dalam Pasal 12 ayat (2) PP tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah bahwa: "kelebihan kemampuan pelayanan terhadap bukan anggota tidak berlaku untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi".

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana Kegiatan Usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Anggota dan Bukan anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Filosofis?" dan "Bagaimana implementasi kegiatan usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Bukan anggota dihubungkan dengan tujuan Koperasi?" Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui Kegiatan Usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Anggota dan Bukan anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Filosofis.
2. Untuk memahami implementasi kegiatan usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Bukan anggota dihubungkan dengan tujuan Koperasi.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang dipilih adalah deskriptif analisis, tahap penelitian yang digunakan studi kepustakaan yaitu penelitian terhadap data -data sekunder yang merupakan bahan -bahan hukum yang bersifat mengikat terhadap masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut dapat diperoleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder, dan hukum tersier.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kegiatan Usaha Koperasi yang pelayanannya dilakukan kepada Anggota dan Bukan anggota Ditinjau dari Aspek Yuridis

Pasal 43 tentang UU Perkoperasian menyebutkan bahwa setiap usaha koperasi berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota. Selain itu kelebihan Pelayanan usaha koperasi dapat digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota. Pada intinya Koperasi dapat membuka pelayanan usaha terhadap masyarakat atau bukan anggota, apabila koperasi tersebut memiliki kelebihan kemampuan yang mana kelebihan kemampuan itu kelebihan kapasitas dana dan daya yang dimiliki koperasi untuk melayani anggotanya.

Dari UU Perkoperasian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umum, dilakukan dalam rangka keikutsertaan koperasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya merupakan fungsi dan peran koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Selain itu Koperasi pun dapat membuka pelayanan usaha terhadap masyarakat/bukan anggota ketentuan tersebut dapat dilakukan apabila koperasi memiliki kelebihan dana dan daya untuk melayani anggotanya.

Namun saat ini ketentuan yang mengatur usaha koperasi serta pelayanannya pada UU Perkoperasian terjadi penambahan di Pasal 86 UU Cipta Kerja tentang Usaha Koperasi. Pada intinya usaha koperasi itu dapat dilaksanakan secara tunggal usaha atau serba usaha. Kelebihan kemampuan dari pelayanan usaha koperasi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam hal ini merupakan daya tarik untuk masyarakat agar menjadi anggota koperasi.

Ketentuan mengenai Kegiatan Usaha Koperasi terhadap anggota dan bukan anggota diatur lebih lanjut pada PP tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, yang merupakan turunan dari UU Cipta kerja. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 10-12 tentang Usaha Koperasi, yang pada intinya kegiatan usaha Koperasi diselenggarakan berdasarkan kesamaan usaha, potensi dan kebutuhan anggota. koperasi harus mengutamakan kebutuhan dan melakukan pelayanan terbaik kepada anggotanya hal tersebut untuk menumbuhkan loyalitas dan kepercayaan anggota. Lalu untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya, koperasi harus memberi manfaat secara langsung ataupun tidak langsung atas pelayanan/bisnis yang diberikan. Pada PP ini menegaskan bahwa pelayanan usaha koperasi yang pelayanannya dibuka kepada bukan anggota sebagai transaksi bisnis dan ketentuan ini tidak berlaku untuk koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.

Implementasi Pelayanan Usaha Koperasi Yang Pelayanannya Dilakukan Kepada Bukan Anggota Dihubungkan Dengan Tujuan Koperasi

Merujuk kepada UU perkoperasian Koperasi memiliki tujuan yang mengutamakan kesejahteraan anggotanya. Sebagaimana terdapat pada Pasal 4 UU Perkoperasian untuk mewujudkan kesejahteraan anggotanya, koperasi harus membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Dengan terwujudnya hal tersebut maka pelayanan terhadap bukan anggota dapat dilakukan. Karena pada dasarnya tujuan koperasi tidak hanya mensejahterakan anggota saja tetapi juga masyarakat umum. Mensejahterakan masyarakat disini dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kemudian pada kasus koperasi kedua, KUD Bahagia ini tetap menunjukkan eksistensinya sampai saat ini sebagai koperasi unit desa. Berbagai inovasi yang dilakukan membuat KUD ini masih tetap aktif dengan beranggotakan 3.600 an orang. Sekertaris KUD ini mengatakan bahwa kepercayaan anggota dan nasabah yang menyimpan uang di unit usaha simpan pinjam milik KUD Bahagia juga penting. Oleh karena itu, likuiditas unit usaha simpan pinjam selalu dijaga. Hal ini dilakukan agar saat nasabah mengambil simpanan selalu tersedia. Beberapa badan usaha milik KUD Bahagia juga telah legal berbadan hukum. Untuk memberi rasa percaya kepada masyarakat, tidak jarang berbagai program sosial juga tak luput dari perhatian. Menyantuni anak yatim, aksi sosial bagi anggota yang tengah sakit serta pembagian zakat rupanya jadi aspek kepercayaan anggota atau masyarakat uang hendak menggunakan jasa dari unit usaha milik KUD.

Dari penjelasan diatas bahwa pada praktiknya memang benar terdapat koperasi yang membuka pelayanannya terhadap masyarakat yang bukan anggota. KUD Bahagia, melihat dari pernyataan sekretaris dari KUD tersebut ia mengatakan bahwa KUD ini di percaya oleh Anggota dan Nasabahnya namun disini ia menambahkan bahwa nasabah tersebut berasal dari Unit Simpan Pinjam. Yang dimana Pasal 12 PP tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menyebutkan bahwa kelebihan kemampuan pelayanan terhadap bukan anggota tidak berlaku untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan koperasi untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat umum, dilakukan dalam rangka keikutsertaan koperasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Membangun, mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan juga masyarakat pada umumnya merupakan fungsi dan peran koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Selain itu Koperasi pun dapat membuka pelayanan usaha terhadap masyarakat/bukan anggota ketentuan tersebut dapat dilakukan apabila koperasi memiliki kelebihan dana dan daya untuk melayani anggotanya.
2. Pada faktanya terdapat koperasi yang membuka pelayanannya terhadap masyarakat yang bukan anggota. KUD Bahagia, melihat dari pernyataan sekretaris dari KUD tersebut ia mengatakan bahwa KUD ini di percaya oleh Anggota dan Nasabahnya namun disini ia menambahkan bahwa nasabah tersebut berasal dari Unit Simpan Pinjam. Yang dimana Pasal 12 PP tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah menyebutkan bahwa kelebihan kemampuan pelayanan terhadap bukan anggota tidak berlaku

Acknowledge

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingan diantaranya :

1. Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
3. Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
4. Dr. Hj. Yeti Sumiyati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali penulis
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan beserta staf dan jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang kooperatif dalam urusan administrasi dan perizinan

Daftar Pustaka

- [1] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Penerbit buku Kompas, Jakarta, 2010 Hlm. 371
- [2] Mohammad Hatta, *Kumpulan Pidato II*. Jakarta: Idayu Press, 1983, hlm. 160
- [3] Sarbini Sumawintata, *Sejarah Ekonomi Kita Sejarah Tanpa Perubahan*. Prisma No.8 Th XII, Hlm. 52.
- [4] Zulfikri Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*. Kompas, Jakarta, 2010, Hlm. 216
- [5] UU Perkoperasian, Pasal 44
- [6] Dr. H. Sugiyanto, SE., M. Sc., "KOPERASI KINI DAN HARAPAN KEDEPAN" September 25, 2021 <https://ikopin.ac.id/staging/2021/07/06/Koperasi-kini-dan-harapan-kedepan/>
- [7] Hans H. Munker, *Masa Depan Koperasi*. Dekopin. Jakarta, 1997
- [8] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, 1986, Hlm. 118.